

**PENERAPAN MODEL *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* UNTUK  
MENGEMBANGKAN LITERASI DIGITAL PESERTA DIDIK MENUJU  
KEWARGANEGARAAN DIGITAL**

Eka Ahmad Rinaldhi  
*Universitas Sebelas Maret, Surakarta*  
*Ekarinaldhi17@student.uns.ac.id*

**ABSTRAK**

Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification Technique) pada Guru PPKn untuk membentuk dan mengembangkan literasi digital peserta didik menuju kewarganegaraan digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah Model pembelajaran VCT dapat dikembangkan Guru PPKn untuk membentuk dan mengembangkan budaya literasi digital peserta didik secara efektif. Pengembangan peserta didik digital dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah melalui model pembelajaran VCT yang menekankan aspek etika digital dan kontrol diri terhadap berita yang diterima. Peran strategis guru PPKn juga penting dalam membentuk dan mengembangkan budaya literasi digital peserta didik menuju kewarganegaraan digital. Membentuk dan mengembangkan generasi muda dalam budaya literasi digital di era digital citizenship adalah amanah nilai-nilai dasar Pancasila terhadap karakter warga negaranya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

**Kata Kunci :** *model pembelajaran vct, literasi digital, kewarganegaraan digital*

**ABSTRACT**

*The purpose of this article is to describe the application of VCT (Value Clarification Technique) learning models to Pancasila and civic education Teachers to shape and develop students' digital literacy towards digital citizenship. This study used descriptive qualitative method. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques used are library studies and interviews. Data validity is done by data triangulation. The results of this study are that the VCT learning model can be developed by Pancasila and civic education Teachers to form and develop students' digital literacy culture effectively. Digital student development can be done through learning Citizenship Education in schools through VCT learning models that emphasize aspects of digital ethics and self-control of news received. The strategic role of Pancasila and civic education teachers is also important in shaping and developing the digital literacy culture of students towards digital citizenship. Forming and developing the younger generation in the culture of digital literacy under digital citizenship is a mandate of the basic values of Pancasila towards the character of its citizens through Pancasila and Citizenship Education.*

**Keyword :** *vct learning model, digital literacy, digital citizenship*

**PENDAHULUAN**

Saat ini literasi digital penting untuk diterapkan kepada peserta didik. Mudah dan maraknya penggunaan internet baik melalui gawai, laptop, atau netbook oleh kalangan remaja dapat memberikan efek negatif. Pengawasan harus terus dilakukan kepada anak dan remaja Indonesia

terhadap akses internet sehingga efek negatif bisa segera dihindari. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dapat menimbulkan dampak terhadap perilaku yang negatif kepada anak karena konten yang ada di media internet maupun media sosial tidak semuanya layak untuk dikonsumsi. Anak dan remaja Indonesia memiliki kecenderungan mencotok

## Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

perbuatan apa yang mereka lihat pada media digital dan informasi yang diperoleh dari internet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada tahun 2017 menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun. perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik manfaat internet, juga menimbulkan banyak mudarat dan dampak yang mengkhawatirkan, mulai dari pornografi, kasus penipuan, dan kekerasan yang semua bermula dari dunia maya.

Dikutip dari CNN Indonesia (April, 2019) Sebagian besar pelajar SMA mayoritas menggunakan teknologi digital untuk hiburan dan media sosial. Hal ini diakui oleh pelajar dari empat kota di Indonesia, Bandung, Pontianak, Surabaya, dan Denpasar. Sebanyak 47 persen pelajar di Pontianak, Bandung 42,2 persen, dan Surabaya 32 persen menggunakan internet untuk hiburan. Penggunaan internet untuk bermedia sosial menempati posisi dua dari pelajar di tiga kota ini. Sementara proporsi kedua kegiatan ini agak berbalik bagi remaja di Denpasar. Sebab, mereka lebih banyak menggunakan internet untuk bermain media sosial (33 persen) ketimbang hiburan (24,6 persen). Terungkap dari survey etika digital fase pertama yang dilakukan oleh Siberkreasi pada September-November 2018. Kota-kota ini dipilih sebagai lokasi survey karena penetrasi internet atau teknologi digital di sana di atas 70 persen. Tingkat penetrasi itu berdasarkan hasil penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017. survey Siberkreasi ini mengumpulkan 2.000 responden dengan rentang usia 13-18 tahun, yang masih duduk di bangku SMA/ sederajat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pendidikan memiliki peran yang penting dalam mengajarkan dan menumbuhkan kewarganegaraan digital kepada peserta didik sebagai warga negara muda. Salah satu mata pelajaran yang mampu menumbuhkan karakter kewarganegaraan digital pada

peserta didik adalah melalui mata pelajaran PKn. Budimansyah (2010: 9) mengemukakan bahwa dalam praktiknya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

PPKn mata pelajaran yang berperan menumbuhkan etika digital pada peserta didik sebagai warganegara muda yang meliputi pemahaman peserta didik tentang penggunaan media digital secara positif dan bertanggung jawab, dan bagaimana cara berkomunikasi secara daring dengan aman. PPKn dapat efektif digunakan sebagai media untuk menumbuhkan dan mengembangkan etika digital pada peserta didik, jika guru menggunakan dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah. Ketika terjadi fenomena lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital dan internet yang dilakukan oleh anak dan remaja, maka lembaga pendidikan melalui guru harus segera mengatasi kelemahan tersebut, dengan cara menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan "melek" etika digital kepada peserta didik dan mata pelajaran yang tepat digunakan dalam menumbuhkan karakter kewarganegaraan digital (digital citizenship) tersebut adalah melalui PPKn.

Mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran yang mengemban tugas membentuk karakter warganegara, harus membimbing siswa untuk menjadi warga digital yang beretika. Isman. Dkk (2014: 73) mengemukakan yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital adalah kemampuan warganegara untuk menggunakan teknologi dengan kompeten, memahami konten digital dan dapat menilai kredibilitasnya, membuat, meneliti dan berkomunikasi dengan alat yang tepat, serta berpikir kritis tentang peluang etis dan tantangan dunia digital, membuat pilihan yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki etika dalam penggunaannya.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan model pembelajaran VCT (Value Clarification

# Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019

## "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Technique) pada Guru PPKn untuk membentuk dan mengembangkan etika digital peserta didik dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax).

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha menyajikan data berupa keterangan informan, observasi lapangan, studi dokumen yang berhubungan dengan substansi etika digital dalam menanggulangi penyebaran berita bohong. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terstruktur. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data.

### HASIL

#### Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Beberapa negara di dunia memiliki pendekatan yang berbeda-beda terkait penerapan pendidikan kewarganegaraan. Indonesia istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikenal lebih akrab dengan PPKn. Indonesia menerapkan status PPKn dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri atau tidak diintegrasikan seperti dinegara lain yang masuk dalam pelajaran seperti sejarah, ilmu sosial, dan lain sebagainya.

Cogan (1998) mengemukakan pendidikan kewarganegaraan meruakan pendidikan yang menyiapkan generasi muda yang memiliki identitas kebangsaan dan memiliki kecakapan, pengetahuan, dan nilai yang diperuntukkan untuk hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Budimansyah (2010) juga memaparkan bahwa PPKn di Indonesia dipahami sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang faham dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara fakta yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945. *Smart and good citizen* adalah misi yang

diusung dalam menciptakan warga negara Indonesia.

Winatapura (2016) mengemukakan wahana pendidikan karakter yang memiliki visi misi utuh adalah PPKn dengan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan. Secara konsep instrumental dan idiil, PPKn secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dalam visi misinya dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogies dan sosial-kultural warga negara dalam konteks kebudayaan Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Hakikat paradigma baru pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pembentukan kesadaran menjadi civil society dengan memberdayakan warga negara melalui pendidikan agar peran aktif warga negara dalam kehidupan demokratis (Suryanto, dkk (2018 ; 6).

Groof dan Franck (ICCS, 2013) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk anak atau remaja menjadi orang yang berfikir dan bertindak secara demokratis. Artinya memberikan fokus pada memperlengkapi warga negara muda dengan sejumlah kesadaran dan keterampilan dasar yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara konstruktif dan kritis dalam kehidupan sosial.

Branson (1998) menyatakan pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan dengan perkembangan dan penguatan karakteristik peserta didik. Institusi pendidikan jika memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan karakter publik dan pribadi akan memberikan dampak efektif keberjalanan pendidikan kewargaegraan. Dengan begitu mendorong tumbuhnya karakter yang dibutuhkan dalam berpartisipasi secara aktif dan efektif. Untuk itu guru harus melakukan dan memilih strategi pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Penelitian yang dilakukan Benazirria (2018) menyatakan bahwa PPKn memiliki

## Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

peran strategis dalam membentuk dan mengembangkan literasi digital padapeserta didik sebagai warga negara. Dengan terbentuknya literasi digital ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam persoalannya etika digital yang ada dalam diri peserta didik. Sebagai wujud etika kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan digital sebagaimana yang dimaksud.

Bischoff (2016) mengemukakan bahwa sekolah melatih peserta didik untuk berpartisipasi dan sebagai tindakan konsekuensi untuk mengajarkan kehidupannya dimasa depan. Untuk itu PPKn memberikan pengaruh pembentukan karakter untuk partisipatif dan berfikir kritis. Guru bisa untuk memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang relevan dan tepat sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Guru PPKn harus bisa mengembangkan karakter peserta didik salah satunya karakter literasi digital untuk membangun kewarganegaraan digital. Artinya melekat terhadap pada literasi digital dengan bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan media digital dan internet. Sehingga diperlukan strategi dalam pembelajaran yang mendorong peserta didik kearah kewarganegaraan digital. Guru PPKn telah mengusahakan untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa kelas digital dengan menyisipkan dan memberikan teladan serta motivasi untuk bersikap baik selama pembelajaran berlangsung (Lisa, dkk. 2019)

### **Pengembangan Literasi Digital Untuk Mewujudkan Kewarganegaraan Digital**

Dewasa ini literasi digital atau melek digital sangat penting bagi peserta didik. Namun yang terjadi saat ini banyak kecenderungan penggunaan digital yang mengarah pada hal negatif karena berbagai faktor. Seperti minimnya pengawasan orang tua yang membuat leluasanya anak dalam menggunakan media digital dan internet. Karena dalam media digital dan internet tidak semua konten layak dikonsumsi semua kalangan. Sehingga peran penting PPKn diperlukan untuk mengembangkan literasi digital peserta didik.

Literasi digital dikembangkan oleh Paul Gilster yang mengemukakan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dengan berbagai

format dalam penekanannya pada pemikiran kritis dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana Calvani dan Cartelli mengemukakan literasi digital sebagai pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menggunakan media digital dan internet. Simpulannya bahwa literasi digital dipahami dalam tiga aspek yaitu kompetensi digital, penggunaan digital, dan transformasi digital (Chan, dkk, 2017:2).

Literasi digital merupakan kompetensi dan kemampuan yang menunjukan, menemukan, mengevaluasi, menerima atau menolak informasi pada penggunaan digital dan internet (Fieldhouse dan Nicholas, 2008:49). Perkembangan yang begitu cepat terhadap teknologi mendorong berkembang pula literasi digital bukan lagi sekedar literasi konvensional. Revolusi digital telah mengubah perilaku pencarian informasi yang dengan mudah diakses melalui media digital dan internet. Maka perlu penjagaan terhadap pola yang mendorong ke arah literasi digital.

Etika sebagai bagian dari literasi digital harus dikembangkan secara optimal dan memiliki karakter kuat dan bertanggung jawab yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Dengan begitu dapat menghindari kenegatifan dari digital online yang membahayakan peserta didik. Keterampilan dan pengetahuan harus terus diberikan oleh guru dalam mengutarakan gagasan dan opini dalam media digital dan internet sebagai konten digital. Oleh karenanya literasi digital erat kaitannya dengan etika digital dimana seseorang dilandasi norma-norma yang berlaku dalam menggunakan media digital dan internet secara bertanggung jawab dan memilih konten positif dengan melakukan penyaringan dan pemilihan informasi yang didapat melalui media digital dan internet.

### **Kewarganegaraan Digital**

Penggunaan teknologi yang semakin pesat dapat berpotensi disalahgunakan seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, kejahatan cyber dan lain sebagainya yang diperlukan penanganan dan kebijakan dalam mengelola penggunaan media digital dan internet. Membuat kebijakan yang berfokus pada kewarganegaraan digital dengan pendekatan literasi digital harus bisa disusun secara menyeluruh dengan menggunakan dan

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

memanfaatkan peran strategis lembaga pendidikan. Dengan lembaga pendidikan melalui pendidikan berperan mempersiapkan warga negara digital dengan salah satunya dapat dimulai dari pembelajaran PPKn.

Choi (2016) mengutarakan kewarganegaraan digital adalah sebagai etika. Dengan mengacu pada bagaimana penggunaan internet dengan tepat, aman, dan bertanggung jawab. Kewarganegaraan digital melihat bahwa perilaku online yang bertanggung jawab dan aman harus menjadi topik serius dalam pendidikan. Karena itu menjadi kriteria kewarganegaraan digital.

Kewarganegaraan digital menurut Ribble (Alberta, 2012) meliputi: pertama, warga negara yang memiliki akses digital (partisipasi elektronik penuh), kedua, komunikasi digital, ketiga, literasi digital, yaitu proses belajar mengajar tentang teknologi dan penggunaan teknologi, keempat etika digital, yaitu standar perilaku dalam menggunakan media digital dan internet), kelima, digital Law, yaitu tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan menggunakan elektronika, keenam, keamanan digital, yaitu tindakan pencegahan elektronik untuk melindungi peserta didik, kelompok masyarakat, organisasi dan warga negara), ketujuh, digital health and wellness, yaitu kesehatan fisik dan psikologis di dunia digital, kedelapan, hak dan tanggung jawab digital.

Kewarganegaraan digital membutuhkan prinsip moral yang tinggi. Pemberdayaan dan tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat perlu dibangun pula melalui kewarganegaraan digital. Melalui kewarganegaraan digital memberi ciri melek digital dengan kecakapan literasi digital. Dengan literasi digital memberikan cegah tindakan menyimpang dalam penggunaan media digital dan internet. Oleh karenanya, lembaga pendidikan melalui guru PPKn dapat menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital sebagai wujud kewarganegaraan digital. Peserta didik merupakan warga digital dan memiliki karakteristik sebagai digital native, dan mayoritas kewarganegaraan digital peserta didik masih kurang, kewarganegaraan digital tersebut diukur dari unsur hukum digital, etika digital, hak dan kewajiban digital (Rini, 2018)

**Strategi Guru PPKn Dalam Mengembangkan Literasi Digital Melalui Model Pembelajaran VCT**

Kewarganegaraan digital memberi peran strategis dengan diwujudkan oleh guru PPKn. Dapat menjadikan warga negara yang bertanggung jawab, berpengetahuan luas, dan aktif. Lakstian (2016) menjelaskan bahwa penggunaan internet secara dominan dinikmati oleh kalangan menengah. Perkembangan dunia teknologi khususnya internet yang pesat harus bisa diiringi dengan peningkatan kesadaran untuk menyaring dan memilah informasi dari media digital dan internet. Pendidikan nilai menjadi cenderung kegiatan formal dalam kurikulum pendidikan nasional (Tilaar, 1998). PPKn diartikan untuk mempersiapkan warga negara untuk dapat berpartisipasi, berperan dan bertanggung jawab sebagai *good citizen*.

Berdasar teori yang dikemukakan sebelumnya, peran guru PPKn penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital. Literasi digital dapat disisipkan disemua kompetensi dasar dalam pembelajaran SMP maupun SMA. PPKn memberikan penguatan pembelajaran nilai dan karakter yang mendorong kecakapan literasi digital dalam mewujudkan kewarganegaraan digital. Untuk itu dalam perwujudannya dapat digunakan model pembelajaran yang berfokus pada peningkatan sikap yaitu model pembelajaran Value Clarification Technique atau teknik klarifikasi nilai. Pluto, dkk (2018) mengemukakan bahwa menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) siswa tidak hanya akan menghafal melainkan juga melakukan suatu analisis, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan untuk dirinya sendiri.

Djahiri (1985) mengemukakan VCT sangat efektif diterapkan untuk menginternalisasikan nilai kepada peserta didik. Kelebihan dari VCT adalah 1) menanamkan dan mengembangkan nilai moral siswa, 2) siswa berpotensi mengklarifikasi dan menggali informasi pada bahan pembelajaran, 3) guru dapat mengklarifikasi dan mengevaluasi kualitas nilai moral, 4) VCT mendorong, melibatkan, dan membimbing peserta didik pada perilaku potensial, 5) memungkinkan mengambil pelajaran dari kehidupan seseorang, 6) menghindari, meniadakan

# Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019

## "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

intervensi nilai-nilai tidak dibutuhkan, 7) penggambaran nilai moral yang harusnya diterima.

Nuryanto dan Suyatno (2016) menjelaskan penerapan model VCT dapat meningkatkan karakter peserta didik. Membantu mengkaji perasaan dan perbatan tentang nilai-nilai yang dirasakan peserta didik. Dimana nilai dianggap baik untuk diterapkan dalam kehidupannya. Peningkatan solidaritas sosial juga muncul dalam penerapan model VCT. Dahliar (2017) mengemukakan penerapan model pembelajaran VCT dalam proses pembelajaran dikelas dapat menumbuhkan dan meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik. Menurut Komalasari (2016) juga bahwa Penerapan model pendidikan nilai-nilai kehidupan dalam bahan ajar secara signifikan mempengaruhi disposisi kewarganegaraan peserta didik. Pemakaian model VCT menimbulkan kepedulian sosial peserta didik. Dengan VCT menanamkan nilai kepedulian sosial dan kepekaan sosial. Penerapan model pembelajaran VCT mampu menumbuhkan, mengembangkan dan memperbaiki karakter peserta didik (Khairunisa, 2017).

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberi simpulan bahwa model pembelajaran VCT mendorong dan cocok digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kecakapan literasi digital oleh guru PPKn kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan berbagai teknik yang relevan untuk digunakan. Djahiri (1985) mengemukakan teknik model pembelajaran VCT, meliputi : pertama, metode percontohan, kedua VCT menggunakan analisis nilai, yaitu reportase/liputan, analisis secara akurat, analisis tulisan dan cerita tidak selesai, ketiga VCT menggunakan daftar/matrix meliputi, yaitu daftar baik – buruk, daftar tingkat urutan, daftar skala prioritas, daftar gejala kontinum (terus menurun, daftar penilaian diri sendiri, dan daftar membaca perkiraan orang lain tentang diri kita, keempat VCT menggunakan kartu keyakinan, diantaranya VCT menggunakan wawancara VCT menggunakan yurisprudensi, dan VCT menggunakan teknik inkuiri nilai.

### SIMPULAN

Permasalahan yang harus segera diatasi saat ini salah satunya adalah degradasi moral akibat penyalahgunaan media digital. Dengan hasil yang telah dipaparkan penulis menyimpulkan bahwa VCT dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter kewarganegaraan peserta didik tentunya melalui literasi digital yang aman. Oleh karenanya guru PPKn memiliki peran strategis untuk menerapkan model pembelajaran VCT dengan metode pembelajaran untuk pembentukan karakter dan kecakapan literasi digital peserta didik. Literasi digital berarti berkaitan dengan etika digital dalam penggunaan media digital dan internet. Penggunaan secara aman, tepat, dan bertanggung jawab serta dapat menyaring dan memilah informasi secara kritis akan mendorong kewarganegaraan digital. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk karakter peserta didik dan guru harus bisa mengembangkan karakteristik peserta didik sehingga harus pula mengembangkan dan berinovasi dalam proses pembelajaran dikelas. Selain itu, peran orang tua harus lebih dioptimalkan kemampuannya dan secara aktif mengawasi dan bertindak positif terhadap penggunaan media digital dan internet terhadap anak-anak. Peningkatan profesionalitas guru dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti pelatihan media digital dan internet agar paham dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk orang tua dapat diadakan penyuluhan melalui lembaga berwenang mengenai pentingnya literasi digital supaya orang tua, dapat melek digital dan dapat mengawasi penggunaan media digital pada anak. Sehingga perilaku menyimpang akibat penggunaan media digital yang salah dapat diminimalisir.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Benaziria. (2018). *Pengembangan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT*. Jurnal.unimed.ac.id
- [2] Bischoff, K. (2016). The civic effects of schools: Theory and empirics. *Theory and Research in Education*. 14, 91-106.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

- [3] Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung. Widya Aksara Press.
- [4] Budimansyah, D. (2010). *Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah*. Jurnal Penelitian Pendidikan, 11, 8- 16.
- [5] Branson, S.M. (1998). *The role of civic education. Amerika: Center for Civic Education*.
- [6] Chan, K.S.B. Churchill, D. & Chiu, F.K.T. (2017). *Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach*. Journal of International Education Research, 13, 1-16.
- [7] Choi, M, (2016). *A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age*. theory & research in social education, 00, 1–43.
- [8] Cogan, J.J. (1998). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.
- [9] Dahliar. (2017). *the implementation of vct (value clarification technique) Modelin improving students' responsibility character on environmentin Indonesia (a case study in state senior high schools in solok regency)*, Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education, 1, 293-297.
- [10] Djahiri, A. K. (1985). *Strategi pengajaran afektif-nilai- moral vct dan games dalam vct*. Bandung: FPIPS
- [11] Fieldhouse, M. & Nicholas, D. (2008). *Digital Literacy as Information Savvy: The Road to Information Literacy*.
- [12] <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190401154314-185-382628/remaja-kerap-pakai-internet-untuk-hiburan-dan-media-sosial>
- [14] International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (2013). *ICCS, 2009 Encyclopedia approaches to civic and citizenship education around the world*. Netherland: Multicopy
- [15] Isman, Aytekin , Ozlem Canan Gungoren. *Digital Citizenship. TOJET : The Turkish Online Journal of Educational Technology*. 2014 Vol. 13. 1
- [16] Khairunisa, N. (2017). *The Implementation of Value Clarification Technique (VCT) Learning Model to Improve Social Care Character in Social Science Learning*. International Journal Pedagogy of Social Studies, 2, 1-5.
- Komalasari, Kokom, and Sapriya. (2016). *Living Values Education in Teaching Materials to Develop Students' Civic Disposition*. The New Educational Review, vol. 44, no. 2, p. 107+. Academic OneFile, Accessed 22 May 2019.
- [17] Lakstian, V. (2016). *The contributions of literacy skills to national development*. Leksema. 1, 11-118.
- [18] Lisa Agustini, Rini Triastuti, Winarno. (2019). *Studi Tentang Civic Disposition Pada Kelas Digital (Digital Class) Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sma N 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018*. Jurnal PPKn Vo. 7 No. 1 Januari 2019
- [19] Nuryanta & Suyato. (2016). *The impact of the using of value clarification technique (vct) towards civic disposition building in civics subject for grade x of senior high school 1 piyungan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 1.13.
- [20] Pluto Wurdiman, Reza Wahyuni, Nanang Jayani. (2018). *Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Techique (Vct) Terhadap Sikap Toleransi*. Prosiding Seminar Nasional PPKn
- [21] Ribble, M. & Bailey, G. (2007). *Digital citizenships in scholls*. Washington: ISTE.
- [22] Suryanto, Agus Widodo, Nursalim. (2018). *Pengembangan Model Pembelajaran Berlatar Isu Kontroversial Sebagai Penguatan Watak Warga Negaraan Mahasiswa*. Scopus.com, Cakrawala Pendidikan 37(2), pp. 250-259
- [23] Rini Triastuti. (2017). *Model*

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

*Pengembangan Pendidikan  
Kewarganegaraan Bagi Upaya  
Pembinaan Kewarganegaraan Digital  
(Digital Citizenship) Melalui Pemanfaatan  
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di  
Sekolah.* Upi.edu., scholar.google.co.id

*pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan  
muatan/mata pelajaran pendidikan  
pancasila dan kewarganegaraan (PPKn)  
dalam konteks sistem pendidikan  
nasional.* Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1,  
15-36.

- [24] Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa agenda  
reformasi pendidikan nasional dalam  
persektif abad 21.* Magelang: Tera  
Indonesia.
- [25] Winaputra, S.U. (2016). *Posisi akademik*



